TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN YANG DIPAILITKAN

Oleh:
Vesmin Jani

Pada dasarnya Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Oleh karena, Direksi dianggap memiliki 2 (dua) fungsi utama, yakni fungsi pengelolaan (manajemen) dan fungsi representasi (perwakilan). Fungsi pertama menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Oleh karenanya, Direksi harus dilengkapi otoritas untuk dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum. Sedangkan fungsi kedua, dalam hal ini fungsi representasi dianggap sebagai perwujudan subjek hukum yang melekat pada Perseroan sebagai subjek hukum. Sehingga Direksi mesti melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi tetapi bermetamorfose pada Perseroan.

Apabila tindakan atau perbuatan hukum Direksi dilakukan dalam batas kewenangan, maka tindakan ini dikategorikan bersifat *intravires*. Sehingga, Direksi tidak memikul resiko atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena, yang memikul resiko adalah principal dari Direksi (sebagai pemegang mandate / pemegang kuasa) yaitu PT berdasarkan doktrin *respondeat superior* (tanggung jawab mengalir ke atas). Akan tetapi, jika Direksi bertindak melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan, maka tindakan tersebut dikategorikan bersifat *ultravires* yakni melampaui batas kewenangan. Sehingga akibat hukumnya, Direksi telah kehilangan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya perbuatan hukum tersebut dapat

dibatalkan (*voidable*). Selain itu, resiko atas tindakan ultravires ini yaitu tidak dapat dapat dilimpahkan pada Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 104 UU PT dikatakan bahwa, jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab ini berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Tindakan atau perbuatan ultravires Direksi ini merupakan tindakan atau perbuatan yang memang menjadi tanggung jawab pribadi Direksi. Akan tetapi, anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan bahwa:

1. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dalam UU Perseroan Terbatas ini merupakan *lex generalis* yang dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan

tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, dalam hal perbuatan tersebut:

- a. Dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- b. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut.
- c. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - 1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.

- 2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.
- 3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya.
- 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.

Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lebih sulit lagi, apabila perusahaan tersebut ada dan dibentuk berdasarkan peraturan daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Karena kebanyakan tidak punya hak eksekusi dalam memaksa suatu organ tertentu untuk melakukan sesuatu seperti yang dapat dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebaiknya dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu direvisi supaya tanggung jawab jajaran direksi menjadi jelas sehingga sebisa mungkin dapat mengelola suatu perusahaan dengan sungguh-sungguh karena akan ada dampak yang dapat ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Keawajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. “Restriktif Status Dewan Pengawas KPK.” Jurnal Education and Development. vol. 8, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2018. “Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” Jurnal Education and Development. vol. 4, no. 1
- Widjaja, Gunawan, 2006. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.